



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Mei 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS ANDALAS

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **AFRIWARDI**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **860785**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **2.600.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah Seluas 965 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **245.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA VIOS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOTOR, YAMAHA V 110 ZHE Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
3. MOBIL, TOYOTA AGYA 1.2 G M/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
4. MOBIL, SUZUKI KATANA Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
5. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000



6. LAINNYA, PACIFIC SEPEDA GUNUNG Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	32.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	254.596.051
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.132.596.051
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.132.596.051

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.